

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERALATAN KESELAMATAN KAPAL LAUT DAN PENYE-  
BERANGAN DI PROVINSI MALUKU**

**PUBLIC PERCEPTION OF SAFETY EQUIPMENT MARINE VESSEL AND FERRY IN THE  
PROVINCE MALUKU**

Bambang Siswoyo  
Badan Litbang Perhubungan  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat 10110  
[email: siswoyobambang71@gmail.com](mailto:siswoyobambang71@gmail.com)

Diterima: 19 Februari 2016, Revisi 1: 11 Maret 2016, Revisi 2: 24 Maret 2016, Disetujui: 6 April 2016

**ABSTRAK**

Dalam upaya meningkatkan keselamatan angkutan laut dan penyeberangan, pemeriksaan harus dilaksanakan disetiap kapal pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sarana transportasi laut di Indonesia banyak yang berusia tua sehingga kemampuannya tergolong relatif rendah dalam memenuhi harapan pengguna jasa akan pelayanan yang baik dan memuaskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam rangka kajian ini adalah analisis diskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana regulator, awak kapal dan masyarakat mengetahui pemakaian, darurat bahaya, dan pengoperasian peralatan keselamatan kapal dalam mendukung keselamatan kapal dalam pelayaran pada kapal laut dan penyeberangan di Provinsi Maluku. Pengguna kapal secara keseluruhan di Provinsi Maluku terhadap kontribusi persepsi masyarakat terhadap peralatan keselamatan kapal berpendapat bahwa pentingnya penempatan alat-alat keselamatan kapal sebesar 42%, ketersediaan perlengkapan penyelamat jiwa/ *life saving appliances* sebesar 30%, ketersediaan alat keselamatan yang ada di kapal sebesar 12%, ketersediaan data pendukung keselamatan kapal (dokumen) sebesar 16%, dan upaya peningkatan pelayanan keselamatan kapal khususnya di wilayah Maluku sebesar 0%. Pengguna kapal secara keseluruhan di Provinsi Maluku, kontribusi persepsi masyarakat terhadap peningkatan keselamatan kapal berpendapat bahwa komitmen peningkatan alat-alat keselamatan kapal sebesar 7%, SDM yang mengelola dan maintenance perlengkapan penyelamat jiwa/ *life saving appliances* sebesar 14%, ketersediaan peralatan keselamatan yang ada di kapal sebesar 14%, kelembagaan yang mengawasi ketersediaan peralatan keselamatan kapal sebesar 28%, lingkungan kapal sebagai upaya meningkatkan pelayanan keselamatan kapal khususnya di wilayah Maluku sebesar 15%, dan mobilitas peralatan keselamatan kapal sebesar 22%.

**Kata Kunci:** sistem dan prosedur, pemeriksaan, peralatan, keselamatan, peralatan.

**ABSTRACT**

*In an effort to improve the safety of sea transport and crossing, the examination must be carried out on each vessel in general. It is inevitable that the conditions of sea transportation in Indonesia, many age old are relatively low, so its ability to meet the expectations of service users would be a good service and satisfying. Data analysis techniques used in the framework of this study is a descriptive analysis of quantitative used to determine the extent of the regulator, the crew and the public informed of the use, emergency danger, and the operation of safety equipment aboard in support of the safety of the ship in the cruise on ships and crossing in Maluku province. Users vessel overall in Maluku province to contribute the public perception of the safety equipment aboard argued that the importance of the placement of safety equipment aboard by 42%, the availability of supplies life-saving/ life saving appliances by 30%, the availability of safety equipment on board 12%, the availability of data supporting the safety of the ship (documents) by 16%, and improving the safety of the ship services, especially in Maluku region at 0%. Users vessel overall in Maluku province, the contribution the public perception of safety improvements ship found commitment to increase safety tools ship by 7%, HR management and maintenance supplies life-saving/ life saving appliances at 14%, the availability of safety equipment that is in ships by 14%, institutional supervise boat safety equipment availability by 28%, as a ship environment ministry efforts to improve the safety of ships, especially in the Maluku region of 15%, and the mobility of vessel safety equipment by 22%.*

**Keywords:** systems and procedures, inspection, equipment, safety, equipment.

## PENDAHULUAN

Kondisi Provinsi Maluku yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di sepanjang Maluku, menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di Maluku. Provinsi dengan 11 kabupaten/ kota ini memiliki wilayah lautan yang lebih luas jika dibandingkan luas daratannya, sehingga dibutuhkan sistem transportasi laut yang handal untuk mendukung mobilitas penduduk antar pulau. Sistem transportasi laut yang handal haruslah dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat dan memiliki kualitas yang baik. Hal ini telah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Maluku dengan berupaya menyediakan sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai.

Provinsi Maluku terletak antara:  $2^{\circ}30' - 9^{\circ}$  Lintang Selatan/ *Southern Latitude* dan  $124^{\circ} - 136^{\circ}$  Bujur Timur/ *Eastern Longitude*. Batas Wilayah Provinsi Maluku: Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Seram, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru, Sebelah Timur Berbatasan dengan Pulau Irian, Sebelah Barat Berbatasan dengan Pulau Sulawesi (Anonim, 2014).

Dalam upaya meningkatkan keselamatan angkutan laut dan penyeberangan, pemeriksaan fasilitas keselamatan harus dilaksanakan pada setiap kapal yang akan berangkat berlayar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sarana transportasi laut di Indonesia banyak yang berusia tua, sehingga kemampuannya tergolong relatif rendah dalam memenuhi harapan pengguna jasa akan pelayanan yang baik dan memuaskan. Kelengkapan persyaratan keselamatan dan kelaiklautan, perbaikan dan perawatan kapal yang dilakukan dengan tepat waktu merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan keselamatan pelayaran kapal, terutama kapal penumpang. Peningkatan aktivitas transportasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana, prasarana dan *system* pengoperasian transportasi yang handal telah menimbulkan berbagai permasalahan (Subiakto, 2009).

Maksud penelitian untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang peralatan keselamatan

pelayaran kapal laut dan penyeberangan di Provinsi Maluku saat ini. Tujuan penelitian untuk pemenuhan peralatan keselamatan pelayaran kapal laut dan penyeberangan dimasa yang akan datang. Hasil yang diharapkan dari penelitian untuk memberikan masukan pemenuhan peralatan keselamatan pada moda transportasi laut dan penyeberangan di Provinsi Maluku saat ini dan yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

Setiap kapal mempunyai suatu sistem manajemen keselamatan (SMK) untuk menciptakan iklim kerja yang berwawasan keselamatan dalam mengoperasikan dan menjalankan kapal. Keselamatan pelayaran tidak hanya dilihat dari kondisi kapalnya saja melainkan banyak faktor lain yang memengaruhi. Salah satu faktor penting, yakni penerapan sistem perawatan terencana (*planned maintenance system/PMS*) yang dapat dilakukan oleh operator ataupun galangan. Hal ini tentunya tidak lepas dari persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi keselamatan jiwa di laut (*Safety Of Life At Sea/SOLAS*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1960 (Puslitbang Perhubungan Laut, 2008 & 2013),

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Keselamatan merupakan upaya untuk bebas atau mengurangi tingkat resiko kecelakaan. Keselamatan merupakan hal yang selalu menjadi prioritas utama dalam bidang apapun termasuk di sub sektor transportasi laut. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia saat ini tidak terlepas dari kurangnya

kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan. Budaya keselamatan (*safety culture*) belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan baik oleh pengusaha, pekerja sektor transportasi maupun masyarakat pengguna jasa pada umumnya. Masyarakat tampaknya juga belum peduli terhadap keselamatan dirinya maupun orang lain. Dalam kondisi demikian, penerapan keselamatan tidak hanya semata-mata terbatas pada peningkatan kondisi teknis, sarana atau peraturan melainkan juga seyogyanya disertai dengan pembinaan dan penegakan norma serta standar keselamatan secara terus-menerus. Keselamatan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Faktor manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi keselamatan kapal, dalam hal ini adalah operator kapal (perusahaan), nakhoda dan pengawas kapal (regulator) (Nurwahida, 2003).

Dalam konteks transportasi laut, keselamatan pelayaran dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kapal dapat memenuhi persyaratan keselamatan berlayar, pencegahan pencemaran perairan, pengawakan, pemuatan, kesehatan awak dan penumpang serta status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Keselamatan pelayaran termasuk di dalamnya upaya penanggulangan musibah atau kecelakaan, meliputi beberapa aspek seperti keselamatan berlayar, kalaiklautan kapal serta keselamatan kapal, muatan dan penumpangnya.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatannya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 menyebutkan bahwa pelayaran bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu moda transportasi, tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu melakukan pengangkutan secara masal, menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan. Sarana dan prasarana transportasi dikatakan memadai apabila dari sisi pengoperasiannya dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga

terjadi kelancaran arus barang maupun penumpang (Cahyo Eko Putranto, 2011).

Salah satu sasaran transportasi nasional adalah terwujudnya layanan transportasi yang aman dan selamat. Keselamatan pelayaran menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan layanan transportasi laut. Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang hendak berlayar harus berada dalam kondisi *seaworthiness* atau laik laut. Artinya, kapal harus mampu menghadapi berbagai kejadian alam secara wajar dalam dunia pelayaran. Selain itu kapal layak menerima muatan dan mengangkutnya serta melindungi keselamatan muatan dan anak buah kapal (ABK). Terdapat hubungan yang kuat antara kompetensi perwira bagian deck dan mesin terhadap tingkat kecelakaan. Aspek-aspek dalam kelompok kejuruan kompetensi yang perlu ditingkatkan untuk perwira bagian *deck* yaitu pengetahuan pedoman, pengetahuan peta, peraturan tubrukan di laut, pengetahuan arus dan pasang surut serta kecakapan pelaut (Widarbowo, 2006).

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 117 yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan yang mencakup : a. kelaiklautan kapal; dan b. kenavigasian. Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tersebut bahwa sebelum berlayar, kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 butir 33, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelayakan kapal mensyaratkan bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik. Nahkoda dan ABK harus berpengalaman dan bersertifikat. Perlengkapan, *store* dan *bunker*, serta alat-alat keamanan memadai dan memenuhi syarat. Hal yang tidak kalah penting adalah kapal tidak boleh mencemari lingkungan selama beroperasi di laut. Kondisi di lapangan terutama di pelosok tanah air menunjukkan bahwa aturan yang menyangkut pelaporan sistem manajemen keselamatan (*safety management system*) sering dimanipulasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Angkutan di Perairan*.

Peranan transportasi laut bukan hanya untuk melancarkan arus barang, manusia, akan tetapi juga membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian suatu wilayah. Fungsi transportasi adalah untuk menggerakkan atau memindahkan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem tertentu untuk tujuan tertentu (Bambang Siswoyo dan Abdi Kurniawan, 2014).

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:148) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan menurut

Sugiyono (2012:122), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pengukuran penelitian ini menggunakan skala *Guttman*. Menurut Sugiyono (2012:96) skala *Guttman* digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota ini memiliki wilayah lautan yang lebih luas jika dibandingkan luas daratannya, sehingga dibutuhkan sistem transportasi laut yang handal untuk mendukung mobilitas penduduk antar pulau. Hampir semua Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku memiliki pelabuhan laut. Jumlah pelabuhan laut di Maluku lebih dari 36 pelabuhan laut yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota.

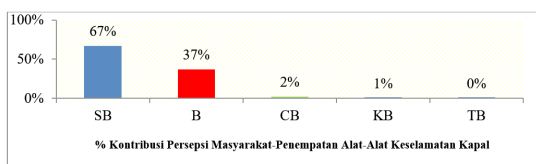
Sepanjang tahun 2014, tercatat 17.529 unit kapal yang tiba dan 17.503 unit kapal yang berangkat pada 32 pelabuhan laut yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku. Dengan demikian, rata-rata kapal yang tiba/merapat di pelabuhan-pelabuhan di Maluku setiap bulannya adalah sekitar 1.460 kapal, dan rata-rata kapal yang berangkat dari pelabuhan-pelabuhan di Maluku setiap bulannya mencapai 1.458 kapal. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Jika dilihat perbulan, jumlah kapal yang tiba dan berangkat di bulan Maret adalah yang paling banyak, dan jumlah kapal yang tiba dan berangkat pada bulan Januari adalah yang paling sedikit. (Anonim, 2014)

Rata-rata penumpang yang turun di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Maluku sepanjang tahun 2014 adalah 67.266 orang setiap bulannya. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan untuk penumpang yang naik dari pelabuhan-pelabuhan di Maluku, rata-rata setiap bulannya adalah 58.615 orang. Tahun 2014 Pelabuhan Ambon merupakan pelabuhan dengan penumpang naik yang paling banyak yaitu

sekitar 215.770 orang atau sekitar 26,73 persen dari seluruh penumpang yang naik di pelabuhan di Maluku. Disusul oleh pelabuhan Namlea yakni 116.200 orang atau sekitar 16,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pelabuhan tersebut memiliki aktivitas naik turun penumpang yang cukup padat dibandingkan dengan pelabuhan lainnya di Maluku. Sedangkan Pelabuhan Elat merupakan pelabuhan dengan aktivitas penumpang naik yang paling sedikit di antara pelabuhan lainnya di Maluku yaitu sebanyak 11.840 orang atau sekitar 1,68 persen dari seluruh penumpang yang naik di pelabuhan di Maluku. Kondisi ini sama dengan tahun lalu dimana Pelabuhan Ambon yang paling padat dan Pelabuhan Elat yang paling sepi dari aktivitas penumpang yang berangkat. (Anonim, 2014)

Lokasi Survei Pelabuhan Ambon, berdasarkan hasil responden terhadap 5 kapal penumpang yaitu KM.Intim Teratai, KM.Tanjung Kabat, KM. Temi, KM. Marsela, dan KM. Bobot Masiwang maka setelah di rata-rata hasil secara keseluruhan untuk lokasi Pelabuhan Ambon terlihat pada gambar 1, sebagai berikut :

**Grafik 1.** Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan Alat-alat Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Ambon

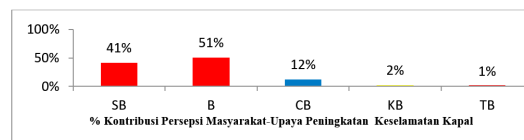


Sumber : data olahan, tahun 2014

### 1) Penempatan alat-alat keselamatan

Secara keseluruhan masyarakat pengguna jasa memberikan kontribusinya terhadap penempatan alat-alat keselamatan kapal, menilai sangat baik sebesar 67 % dan baik sebesar 37 %, sedangkan sisanya 2% menilai cukup baik dan 1 % menilai tidak baik. Hal ini menunjukkan hal yang positif di masyarakat, bahwa kondisi ini telah dinilai sangat baik, seperti terlihat dalam gambar 2.

**Grafik 2.** Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Ambon



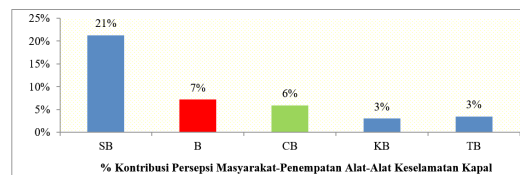
Sumber : data olahan, tahun 2014.

### 2) Upaya Peningkatan Keselamatan Kapal

Sedangkan keseluruhan masyarakat pengguna jasa yang memberikan kontribusinya terhadap upaya peningkatan keselamatan kapal yaitu yang menilai sangat baik sebesar 41 %, baik 51 %, dan cukup baik 12 %. Sedangkan sisanya 2 % menilai kurang baik dan 1 % menilai tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan kapal masih agak rendah dan perlu ditingkatkan.

Lokasi Survei Pelabuhan Bandaneirra, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan hasil responden terhadap kapal penumpang maka setelah di rata-rata hasil secara keseluruhan untuk lokasi Pelabuhan Bandaneirra, terlihat pada gambar 3 sebagai berikut :

**Grafik 3.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan Alat-alat Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Bandaneirra

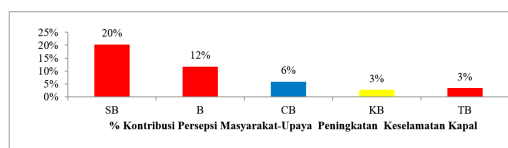


Sumber : data olahan, tahun 2014.

Untuk kontribusi persepsi masyarakat secara umum pada lokasi survey mengenai penempatan alat-alat keselamatan kapal, 21% memilih sangat baik, 7% memilih baik, 6% memilih cukup baik, bahwa hal ini menunjukkan hal yang positif di masyarakat.

Untuk kontribusi masyarakat secara umum, mengenai peningkatan keselamatan kapal, 20% memilih sangat baik, 12% memilih baik, 6% memilih cukup baik, bahwa hal ini menunjukkan masyarakat memiliki hal yang positif terhadap upaya peningkatan keselamatan kapal, seperti terlihat pada gambar 4.

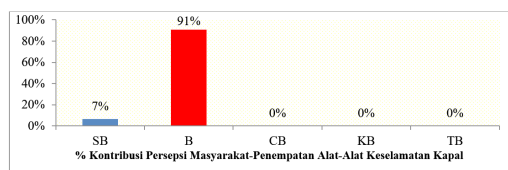
**Grafik 4.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Bandaneirra



Sumber : data olahan, tahun 2014.

Lokasi Survei Pelabuhan Namlea, Kabupaten Buru, dilihat dari hasil persepsi semua responden pada 3 kapal yang disurvei, sebanyak 91% responden menilai bahwa penempatan alat-alat keselamatan di atas kapal sudah baik. Dan 7% lainnya menyebutkan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai positif terhadap ketersediaan alat keselamatan di atas kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Maluku, seperti terlihat dalam gambar 5.

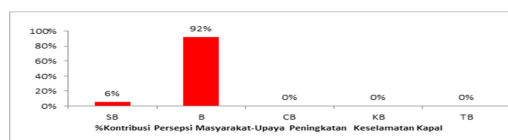
**Grafik 5.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan Alat-alat Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Namlea



Sumber: data olahan, tahun 2014.

Untuk kontribusi masyarakat secara umum, mengenai peningkatan keselamatan keselamatan kapal, 6% memilih sangat baik, 92% memilih baik, dan 0% memilih cukup baik, bahwa hal ini menunjukkan masyarakat memiliki hal yang positif terhadap upaya peningkatan keselamatan kapal, seperti terlihat dalam gambar 6.

**Grafik 6.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Namlea



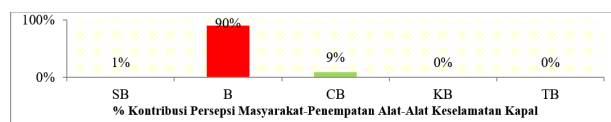
Sumber: data olahan, tahun 2014.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Namlea menilai penempatan alat-alat keselamatan di atas kapal sudah baik dan usulan upaya peningkatan keselamatan kapal juga

sudah dinilai bagus.

Lokasi Survei Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan hasil responden terhadap kapal penumpang maka setelah di rata-rata hasil secara keseluruhan untuk lokasi Pelabuhan Saumlaki, terlihat pada gambar 7 sebagai berikut :

**Grafik 7.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan Alat-alat Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Saumlaki

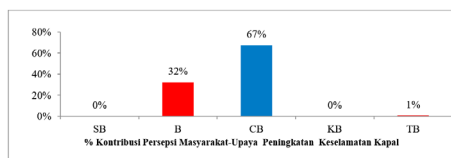


Sumber : data olahan, tahun 2014.

- 1) Pengguna kapal keseluruhan responden di Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku bahwa untuk kontribusi persepsi masyarakat mengenai penempatan alat-alat keselamatan kapal, 1% memilih sangat baik, 90% memilih baik, 9% memilih cukup baik, bahwa penempatan alat-alat keselamatan ini menunjukkan hal yang positif di masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Provinsi Maluku mempunyai kontribusi positif terhadap keselamatan kapal. Selanjutnya bahwa pengguna jasa (masyarakat) mempunyai andil besar dalam kepentingan keselamatan kapal, yang mana masyarakat harus tahu fungsi, gambaran alat, jumlah tersedia dalam kapal, dan cara penggunaan peralatan keselamatan di kapal. Angkutan laut dan penyeberangan di Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku merupakan alat transportasi utama untuk menghubungkan antar wilayah baik kabupaten, kecamatan, desa, maupun antar pulau. Penempatan peralatan keselamatan perlu disosialisasikan kepada pengguna jasa, agar apabila terjadi musibah kecelakaan kapal penumpang dapat mengetahui kemana arah maupun jalur evakuasi.
- 2) Pengguna kapal keseluruhan, untuk kontribusi masyarakat mengenai peningkatan keselamatan kapal, 0% memilih sangat baik, 32% memilih baik, 67% memilih cukup baik, memilih

tidak baik 1%, bahwa hal ini menunjukkan masyarakat memiliki hal yang positif terhadap upaya peningkatan keselamatan kapal. Dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna jasa khususnya pengguna kapal laut dan kapal penyeberangan di Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, masyarakat mempunyai kontribusi positif terhadap peningkatan keselamatan kapal. Masyarakat Provinsi Maluku perlu memberikan dukungan terhadap peningkatan penyediaan peralatan keselamatan kapal guna mendukung kelancaran pelayanan operasional angkutan laut maupun angkutan penyeberangan. Dengan tidak lengkapnya ketersediaan peralatan keselamatan akan menambah rasa takut pengguna jasa dalam menggunakan angkutan laut maupun angkutan penyeberangan, seperti terlihat pada gambar 8.

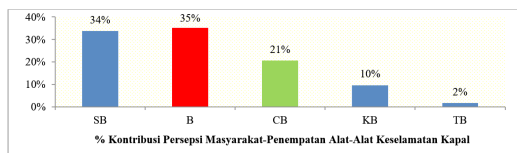
**Grafik 8.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Saumlaki



Sumber : data olahan, tahun 2014.

Lokasi Survei Pelabuhan Tual, Kota Tual, berdasarkan hasil responden terhadap kapal penumpang maka setelah di rata-rata hasil secara keseluruhan untuk lokasi Pelabuhan Saumlaki, terlihat pada gambar 9 sebagai berikut :

**Grafik 9.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan Alat-alat Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Tual



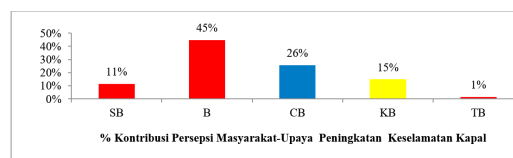
Sumber : data olahan, tahun 2014.

1) Pengguna kapal keseluruhan responden di Pelabuhan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bahwa untuk kontribusi persepsi masyarakat mengenai penempatan

alat-alat keselamatan kapal, 34% memilih sangat baik, 35% memilih baik, 21% memilih cukup baik, 10% memilih kurang baik, dan 2% memilih tidak baik, bahwa penempatan alat-alat keselamatan ini menunjukkan hal yang positif di masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Provinsi Maluku mempunyai kontribusi positif terhadap keselamatan kapal. Selanjutnya bahwa pengguna jasa (masyarakat) mempunyai andil besar dalam kepentingan keselamatan kapal, yang mana masyarakat harus tahu fungsi, gambaran alat, jumlah tersedia dalam kapal, dan cara penggunaan peralatan keselamatan di kapal. Angkutan laut dan penyeberangan di Pelabuhan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku merupakan alat transportasi utama untuk menghubungkan antar wilayah baik kabupaten, kecamatan, desa, maupun antar pulau. Penempatan peralatan keselamatan perlu disosialisasikan kepada pengguna jasa, agar apabila terjadi musibah kecelakaan kapal penumpang dapat mengetahui kemana arah maupun jalur evakuasi.

2) Pengguna kapal keseluruhan, untuk kontribusi masyarakat mengenai peningkatan keselamatan kapal, 11% memilih sangat baik, 45% memilih baik, 26% memilih cukup baik, memilih kurang baik 15%, dan memilih tidak baik 1%, bahwa hal ini menunjukkan masyarakat memiliki hal yang positif terhadap upaya peningkatan keselamatan kapal, terlihat pada gambar 10.

**Grafik 10.** Persentase Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Pelabuhan Tual



Sumber : data olahan, tahun 2014.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna jasa khususnya pengguna kapal laut dan kapal penyeberangan di Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, masyarakat mempunyai kontribusi positif terhadap peningkatan keselamatan kapal.

Masyarakat Provinsi Maluku perlu memberikan dukungan terhadap peningkatan penyediaan peralatan keselamatan kapal guna mendukung kelancaran pelayanan operasional angkutan laut maupun angkutan penyeberangan. Dengan tidak lengkapnya ketersediaan peralatan keselamatan akan menambah rasa takut pengguna jasa dalam menggunakan angkutan laut maupun angkutan penyeberangan.

Sub indikator yang memiliki persepsi masyarakat kurang baik terhadap peralatan keselamatan kapal pada pengguna kapal secara keseluruhan di Pelabuhan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku adalah :

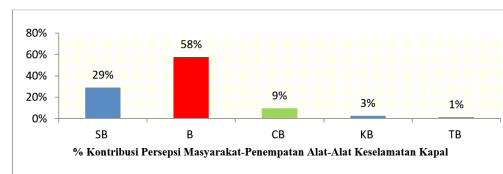
- 1) Ketersediaan sekoci/ *life boat* (boat untuk penolong dengan kapasitas sesuai jumlah penumpang);
- 2) Ketersediaan pompa pemadam, hidran, selang dan alat pemadam/*life pumps, hydrants, hoses and extinguishers*;
- 3) Ketersediaan perlengkapan pemadam kebakaran untuk ruang muat/ *fire appliances in cargo spaces*.

Sub indikator yang memiliki persepsi masyarakat kurang baik terhadap peningkatan keselamatan kapal pengguna kapal secara keseluruhan di Pelabuhan Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku adalah :

- 1) Kurangnya dukungan *financial* dari pemerintah terkait pembiayaan system keselamatan navigasi pelayaran;
- 2) Besarnya mobilitas barang dan manusia terkadang tidak didukung oleh sarana yang ada atau belum terwadahi dengan baik.

Hasil analisis total pelabuhan di Provinsi Maluku untuk kontribusi persepsi masyarakat mengenai penempatan alat-alat keselamatan kapal, dari 8 koresponden, 29% memilih sangat baik, 58% memilih baik, dan 9% memilih cukup baik, bahwa hal ini menunjukkan hal yang positif di masyarakat, dapat dilihat dalam tabel 11, sebagai berikut:

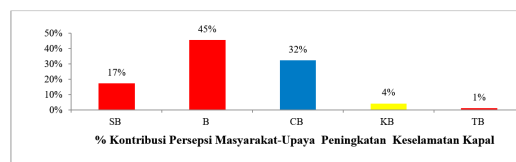
**Grafik 11.** Persentasi Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan Alat-alat Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Provinsi Maluku



Sumber : data olahan, tahun 2014.

Sedangkan hasil analisis total pelabuhan di Provinsi Maluku untuk kontribusi masyarakat mengenai peningkatan keselamatan keselamatan kapal, dari 8 responden, 17% memilih sangat baik, 45% memilih baik, dan 32% memilih cukup baik, bahwa hal ini menunjukkan masyarakat memiliki hal yang positif terhadap upaya peningkatan keselamatan kapal, terlihat pada gambar 12.

**Grafik 12.** Persentasi Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Provinsi Maluku



Sumber : data olahan, tahun 2014.

**Grafik 13.** Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan Alat-alat Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Provinsi Maluku



Sumber : data olahan, tahun 2014.

Pengguna kapal secara keseluruhan di Provinsi Maluku, terhadap kontribusi persepsi masyarakat terhadap peralatan keselamatan kapal, seperti terlihat pada gambar 13 di atas, responden berpendapat bahwa :

- a. Penempatan alat-alat keselamatan kapal sebesar 42%;
- b. Ketersediaan perlengkapan penyelamat jiwa/ *life saving appliances* sebesar 30%;
- c. Ketersediaan alat keselamatan yang ada di kapal sebesar 12%;
- d. Ketersediaan data pendukung keselamatan kapal (dokumen) sebesar 16%;



- e. Upaya peningkatan pelayanan keselamatan kapal khususnya di wilayah Maluku sebesar 0%.

Pengguna kapal secara keseluruhan di Provinsi Maluku, kontribusi persepsi masyarakat terhadap peningkatan keselamatan kapal, seperti terlihat pada gambar 14 di bawah, responden berpendapat bahwa :

- Komitmen peningkatan alat-alat keselamatan kapal sebesar 7%;
- SDM yang mengelola dan maintenance perlengkapan penyelamat jiwa/*life saving appliances* sebesar 14%;
- Ketersediaan peralatan keselamatan yang ada di kapal sebesar 14%;
- Kelembagaan yang mengawasi ketersediaan peralatan keselamatan kapal sebesar 28%;
- Lingkungan kapal sebagai upaya meningkatkan pelayanan keselamatan kapal khususnya di wilayah Maluku sebesar 15%;
- Mobilitas peralatan keselamatan kapal sebesar 22%.

**Grafik 14.** Kontribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Keselamatan Kapal KM. Keseluruhan di Provinsi Maluku



Sumber : data olahan, tahun 2014.

Tingkat pemahaman awak kapal terhadap persiapan atasi kebakaran di atas kapal sebesar 73,33% atau sudah cukup. Awak kapal belum paham benar pada 3 hal mengenai pemicu kebakaran di atas kapal, yakni:

- Bunga api yang berasal dari ketel, cerobong ataupun dari dapur kapal.
- Hubungan pendek (*kortsluiting*) karena kabel-kabel listrik yang terbakar.
- Larangan merokok pada tempat yang telah ditentukan yang tidak dipatuhi.

Sedangkan pemahaman awak kapal terhadap penempatan alat pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR) maupun alat pemadam

api tetap (APAT) pada tempat yang strategis sudah cukup baik. Begitu pula dengan pembagian tugas regu pemadam kebakaran agar tercipta kerjasama yang baik pada saat pemadaman kebakaran dan penempatan APAR juga sudah dipahami dengan cukup baik.

Tingkat pemahaman persiapan pencegahan kebakaran juga baik, yakni 98,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa awak kapal sudah dibekali dengan pengetahuan bagaimana mengatasi keadaan darurat seperti terjadinya kebakaran di atas kapal. Begitu pula dengan tingkat pemahaman keselamatan alat anavigasi di atas kapal sudah baik, yakni 98,67%. Sebagaimana diketahui alat navigasi di atas kapal diperlukan untuk meningkatkan keselamatan kapal, seperti menentukan posisi haluan kapal, menunjukkan adanya rintangan atau bahaya pelayaran dan sebagian merupakan komunikasi pelayaran dengan SROP di wilayah perairan yang sedang dilayari. Hal ini tentunya awak kapal harus paham benar bagaimana mengoperasikan alat navigasi selama berlayar.

Dalam hal alat-alat keselamatan (*life saving appliance*), awak kapal sudah paham dengan tingkat pemahaman 88,07%. Awak kapal harus paham bagaimana menggunakan alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal, dimana menyimpannya dan bagaimana harus menginformasikan kepada penumpang. Namun, ada beberapa aspek yang belum dipahami awak kapal yang beroperasi di Maluku, yakni tingkat pemahaman siji dan isyarat keadaan darurat dan tingkat pemahaman isyarat darurat. Rata-rata tingkat pemahaman masing-masing 11,43% dan 6,67%, yang berarti pemahaman tidak baik. Oleh sebab itu awak kapal yang beroperasi di Maluku perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai siji dan isyarat darurat sehingga keselamatan kapal menjadi lebih terjamin. Adanya isyarat darurat di atas kapal harus dimengerti benar oleh awak kapal, sehingga awak kapal segera mengambil tindakan penyelamatan kapal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan

hasil analisis dan evaluasi, antara lain :

Hasil analisis total pelabuhan di Provinsi Maluku untuk kontribusi persepsi masyarakat mengenai penempatan alat-alat keselamatan kapal, dari 8 koresponden, 29% memilih sangat baik, 58% memilih baik, dan 9% memilih cukup baik. Hal ini menunjukkan persepsi masyarakat mengenai penempatan alat-alat keselamatan kapal sudah baik dan merupakan hal yang positif.

Sedangkan hasil analisis total pelabuhan di Provinsi Maluku untuk kontribusi masyarakat mengenai peningkatan keselamatan keselamatan kapal, dari 8 responden, 17% memilih sangat baik, 45% memilih baik, dan 32% memilih cukup baik. Hal ini menunjukkan persepsi masyarakat mengenai upaya peningkatan keselamatan keselamatan kapal sudah baik dan merupakan hal yang positif.

Pengguna kapal secara keseluruhan di Provinsi Maluku terhadap kontribusi persepsi masyarakat terhadap peralatan keselamatan kapal berpendapat bahwa pentingnya penempatan alat-alat keselamatan kapal sebesar 42%, ketersediaan perlengkapan penyelamat jiwa/ *life saving appliances* sebesar 30%, ketersediaan alat keselamatan yang ada di kapal sebesar 12%, ketersediaan data pendukung keselamatan kapal (dokumen) sebesar 16%, dan upaya peningkatan pelayanan keselamatan kapal khususnya di wilayah Maluku sebesar 0%.

Pengguna kapal secara keseluruhan di Provinsi Maluku, kontribusi persepsi masyarakat terhadap peningkatan keselamatan kapal berpendapat bahwa komitmen peningkatan alat-alat keselamatan kapal sebesar 7%, SDM yang mengelola dan *maintenance* perlengkapan penyelamat jiwa/ *life saving appliances* sebesar 14%, ketersediaan peralatan keselamatan yang ada di kapal sebesar 14%, kelembagaan yang mengawasi ketersediaan peralatan keselamatan kapal sebesar 28%, lingkungan kapal sebagai upaya meningkatkan pelayanan keselamatan kapal khususnya di wilayah Maluku sebesar 15%, dan mobilitas peralatan keselamatan kapal sebesar 22%.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, maka saran yang dapat diberikan dalam kajian adalah

memberikan pemahaman kepada pengguna jasa sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan. Selanjutnya dengan kondisi Maluku sebagai daerah kepulauan, angkutan laut maupun penyeberangan menjadi andalan dalam melakukan mobilitas, sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang keselamatan pelayaran.

Perlu diadakan sosialisasi terhadap penggunaan alat-alat keselamatan kapal sesuai Konvensi SOLAS (*Safety Of Life At Sea*) di atas kapal, terutama saat kapal sedang berlayar. Perlu diadakan pelatihan untuk anak buah kapal (ABK) secara rutin sesuai amandemen SCTW Manila 2010, seperti *Medical Emergency First Aids Course* (MEFA), BST, *Survival Craft and Rescue Boat* (PSCRB), *Advance Fire Fighting* (AFF), *Medical Care* (MC), *Medical First Aid* (MFA), Radar Simulator, dan *Ship Security Officer Course* (SSO). Sehingga setiap anak buah kapal memiliki kemampuan yang cakap dalam penanganan keadaan darurat di atas kapal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Kapuslitbang Perhubungan Laut dan Kepala Kantor Dinas Perhubungan dan Informatika, Kabupaten/ Kota, Kepala Kantor Pelabuhan yang terkait Penelitian ini, yang telah memberikan waktu, data-data sekunder, dan data primer yang diperlukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Provinsi Maluku dalam Angka Tahun 2014*, BPS Provinsi Maluku, Ambon;
- Anonim, *Statistik Transportasi Provinsi Maluku dalam Angka Tahun 2014*, BPS Provinsi Maluku, Ambon;
- Bambang Siswoyo, Abdi kurniawan, Preferensi Rencana Angkutan Laut Kapal Cepat Padang-Kepulauan Mentawai, *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 26, Nomor 11, November 2014, Jakarta;
- Cahyo Eko Putranto, *Studi Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya*, Fakultas Teknik, Program Pasca Sarjana UI, Juli 2011, Depok;
- Nurwahida, *Persepsi Pengambilan Keputusan Terhadap Implementasi Standar Manajemen Keselamatan Kapal-Kapal Pelayaran Rakyat*. Tesis Magister Pro-

- gram Pasca Sarjana UNHAS Makassar. 2003;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Angkutan di Perairan*;
- Puslitbang Perhubungan Laut. (2008), *Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan SOLASoleh Puslitbang Perhubungan Laut*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Jakarta;
- Puslitbang Perhubungan Laut, *Kajian Evaluasi Pemeriksaan Kapal Dalam Pemberian Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan Pengumpan Regional*, 2013, Jakarta;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2002 tentang *Perkapalan*;
- Subiakto, *Preferensi Pengguna Dan Penyedia Jasa Terhadap Sistem Jaringan Transportasi Jalan (JTJ) Yang Mendukung Pelabuhan Di Kabupaten Belitung (Studi Kasus: Pelabuhan Tanjungpandan Dan Pelabuhan Tanjung Ru)*, 2009, Semarang;
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. 2012, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*;
- Widarbowo. *Analisa Kompetensi Perwira Awak Kapal Pelayaran Rakyat*. Program Pasca Sarjana, Universitas Hassanuddin, 2006, Makassar.